



## Moderasi Beragama sebagai Strategi Ketahanan Sosial

(Analisis terhadap Polarisasi Keagamaan Pasca Digitalisasi Dakwah)

Siti Fatimah<sup>1</sup>, Muhammad Faisal<sup>2</sup>

Universitas Darul 'Ulum Lamongan<sup>1</sup>, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri<sup>2</sup>

Email Korespondensi: [fatimah.nurlathifah@yahoo.com](mailto:fatimah.nurlathifah@yahoo.com), [faisal@stainkepri.ac.id](mailto:faisal@stainkepri.ac.id)

Article received: 12 April 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 29 Mei 2026, Article published: 14 Juni 2026

### ABSTRACT

The digitalization of da'wah has brought fundamental transformation to Indonesia's religious landscape, yet simultaneously triggered religious polarization that threatens social resilience. This study analyzes the role of religious moderation as a social resilience strategy in confronting religious polarization post-dakwah digitalization. Employing a qualitative-analytical approach and a multidimensional analytical framework encompassing theological, sociological, digital, institutional, and cultural dimensions, this research develops a four-phase transformation model: identification, mitigation, resilience, and transformation. The analysis reveals that social media algorithms create digital enclaves that reinforce religious segregation, while traditional religious authority undergoes delegitimation through the emergence of celebrity preachers and influencer ustadz. The developed framework identifies five integrative dimensions with measurable indicators for assessing religious moderation levels in digital spaces. Case studies of three religious institutions in Indonesia demonstrate significant variation in institutional responses to digital polarization. This study recommends strengthening digital-religious literacy, reformulating da'wah authority based on competency, and building an inclusive digital ecosystem as sustainable social resilience strategies.

**Keywords:** Religious Moderation, Social Resilience, Religious Polarization, Dakwah Digitalization, Digital Enclave

### ABSTRAK

Digitalisasi dakwah telah membawa transformasi fundamental dalam lanskap keberagaman Indonesia, namun pada saat yang sama memicu fenomena polarisasi keagamaan yang mengancam ketahanan sosial. Penelitian ini menganalisis peran moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial dalam menghadapi polarisasi keagamaan pasca digitalisasi dakwah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dan kerangka analisis multidimensi yang mencakup dimensi teologis, sosiologis, digital, institusional, dan kultural, penelitian ini mengembangkan model transformasi berfase empat yakni identifikasi, mitigasi, resiliensi, dan transformasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma media sosial menciptakan enklave digital yang memperkuat segregasi keagamaan, sementara otoritas keagamaan tradisional mengalami delegitimasi oleh munculnya dai selebritas dan ustadz influencer. Framework yang dikembangkan mengidentifikasi lima dimensi integratif dengan indikator terukur untuk menilai tingkat moderasi beragama di ruang digital. Studi kasus terhadap tiga lembaga keagamaan di Indonesia menunjukkan variasi signifikan dalam respons institusional terhadap polarisasi digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi digital keagamaan, reformulasi

---

*otoritas dakwah berbasis kompetensi, dan pembangunan ekosistem digital yang inklusif sebagai strategi ketahanan sosial berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *Moderasi Beragama, Ketahanan Sosial, Polarisasi Keagamaan, Digitalisasi Dakwah, Enklave Digital*

## PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah secara fundamental cara umat beragama memproduksi, mengonsumsi, dan mendistribusikan pengetahuan keagamaan. Fenomena digitalisasi dakwah yang ditandai dengan maraknya konten keagamaan di platform media sosial, podcast, dan kanal video telah mendemokratisasi akses terhadap wacana keislaman, namun sekaligus membawa dampak yang tidak terduga berupa polarisasi keagamaan yang semakin akut. Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki tradisi keberagaman moderat, fenomena ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan sosial dan kehidupan berbangsa. Data menunjukkan bahwa konten keagamaan di media sosial Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam dekade terakhir, diiringi dengan meningkatnya polarisasi dan fragmentasi komunitas keagamaan secara daring (Slama, 2018).

Polarisasi keagamaan pasca digitalisasi dakwah memiliki karakteristik yang berbeda dari polarisasi konvensional. Jika polarisasi keagamaan tradisional cenderung terkait dengan perbedaan afiliasi organisasi dan interpretasi teologis yang terlokalisasi, maka polarisasi digital bersifat jaringan (*networked*), teralgoritma (*algorithmic*), dan melampaui batas-batas geografis dan institusional (Lim, 2017). Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan engagement secara tidak langsung menciptakan enklave digital (*digital enclaves*) dan ruang gema (*echo chambers*) yang memperkuat keyakinan eksisting dan mengurangi paparan terhadap perspektif yang berbeda. Campbell dan Evolvi (2020) mengidentifikasi bahwa fenomena ini merupakan bagian dari transformasi lebih luas dalam praktik keagamaan digital yang memerlukan analisis kontekstual mendalam.

Moderasi beragama sebagai konsep yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menawarkan kerangka normatif untuk menjaga keseimbangan dalam keberagaman. Namun, implementasi moderasi beragama di ruang digital menghadapi tantangan yang secara fundamental berbeda dari konteks konvensional. Kecepatan penyebaran informasi, anonimitas pelaku, dan logika algoritma platform membuat strategi moderasi konvensional menjadi kurang efektif. Effendi, Lukman, dan Rustandi (2022) menekankan perlunya reformulasi dakwah digital yang berbasis moderasi beragama untuk menghadapi tantangan kontemporer ini. Sementara itu, Bauman (2017) dengan konsep *liquid modernity*-nya memberikan kerangka teoretis untuk memahami bagaimana fluiditas kehidupan modern memengaruhi identitas dan praktik keagamaan yang semakin labil dan mudah berubah.

Kontestasi otoritas keagamaan di ruang digital menjadi salah satu pemicu utama polarisasi. Munculnya dai selebritas dan ustadz influencer yang memanfaatkan logika popularitas media sosial telah menggeser otoritas

keagamaan tradisional yang selama ini menjadi penjaga moderasi (Kholisari, 2025). Rachman dan Saumantri (2025) menganalisis transformasi otoritas keagamaan di era digital melalui perspektif post-normal times Ziauddin Sardar, menunjukkan bahwa kompleksitas dan ketidakpastian di ruang digital menciptakan kondisi di mana otoritas keagamaan semakin terfragmentasi dan sulit diatur. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan hanya menjadi isu teologis, melainkan juga isu ketahanan sosial yang berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kohesi sosial di tengah tekanan polarisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial dalam menghadapi polarisasi keagamaan pasca digitalisasi dakwah. Secara spesifik, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis multidimensi yang mencakup dimensi teologis, sosiologis, digital, institusional, dan kultural; membangun model transformasi berfase yang menggambarkan tahapan dari identifikasi polarisasi hingga transformasi menuju moderasi digital; menganalisis studi kasus lembaga keagamaan di Indonesia; serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi strategis untuk penguatan ketahanan sosial keagamaan di era digital.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat beberapa hal penting. Pertama, belum tersedianya kerangka analisis komprehensif yang secara khusus menghubungkan moderasi beragama dengan ketahanan sosial dalam konteks digitalisasi dakwah di Indonesia. Kebanyakan penelitian existing membahas moderasi beragama dan digitalisasi dakwah secara terpisah, tanpa membangun koneksi teoretis yang memadai antara keduanya. Kedua, perubahan lanskap dakwah digital yang sangat cepat menuntut kerangka analitis yang adaptif dan bersifat multidimensi. Ketiga, potensi dekonstruksi kohesi sosial akibat polarisasi keagamaan digital yang tidak terkelola dengan baik dapat mengancam fondasi kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan strategi ketahanan sosial keagamaan di era digital.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-analitis dengan desain studi literatur berbasis analisis tematik dan pengembangan kerangka konseptual. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengembangkan framework multidimensi dan model transformasi yang dapat mengakomodasi kompleksitas fenomena polarisasi keagamaan pasca digitalisasi dakwah. Sumber data primer meliputi artikel jurnal akademik terindeks yang terbit dalam rentang 2017 hingga 2026, buku-buku seminal tentang digital religion, media sosial, dan moderasi beragama, serta dokumen kebijakan terkait moderasi beragama di Indonesia. Sumber data sekunder mencakup laporan lembaga riset, data platform media sosial, dan publikasi kelembagaan organisasi keagamaan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur tentang polarisasi keagamaan digital dan moderasi beragama. Kedua, sintesis integratif untuk mengembangkan

kerangka analisis multidimensi yang menghubungkan berbagai perspektif teoretis dan empiris. Ketiga, analisis komparatif untuk mengevaluasi respons institusional terhadap polarisasi digital berdasarkan studi kasus lembaga keagamaan di Indonesia. Validitas kerangka analisis dijamin melalui triangulasi sumber data, peer debriefing, dan keterkaitan dengan teori-teori mapan tentang digital religion, social resilience, dan network society. Pendekatan ini mengikuti tradisi penelitian kualitatif kontemporer yang menekankan kedalaman analisis dan kekayaan interpretasi di atas generalisasi statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Framework Multidimensi Moderasi Beragama Digital

Berdasarkan analisis tematik dan sintesis integratif terhadap literatur, penelitian ini mengembangkan framework multidimensi moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial yang mencakup lima dimensi integratif. Setiap dimensi dilengkapi dengan indikator terukur yang memungkinkan penilaian tingkat moderasi beragama di ruang digital secara sistematis. Framework ini mengintegrasikan perspektif teologis yang menekankan dasar normatif moderasi, perspektif sosiologis yang menganalisis dampak sosial polarisasi, perspektif digital yang mengkaji mekanisme algoritmik, perspektif institusional yang mengevaluasi respons organisasi keagamaan, dan perspektif kultural yang mengeksplorasi negosiasi antara nilai-nilai lokal dan global dalam konteks digital.

Dimensi pertama adalah Dimensi Teologis yang merujuk pada fondasi normatif moderasi beragama berdasarkan prinsip-prinsip wasathiyah dalam tradisi keislaman. Dimensi ini mencakup komitmen terhadap prinsip keseimbangan (tawazun), keadilan (adl), dan toleransi (tasamuh) dalam interpretasi teks keagamaan di ruang digital. Sabila, Ridwan, dan Aryansyah (2025) mengidentifikasi model dakwah moderasi ulama Nusantara yang berakar pada tradisi dan ketahanan lokal sebagai sumber inspirasi untuk membangun moderasi beragama digital. Fahmi (2026) menunjukkan bahwa implementasi empat pilar etika Aswaja untuk keharmonisan siber dapat menjadi kerangka teologis yang efektif untuk ketahanan digital Indonesia. Indikator dalam dimensi ini meliputi kelengkapan basis teologis dalam konten dakwah digital, keseimbangan dalam penyajian perspektif keagamaan, dan komitmen terhadap prinsip anti-kekerasan dalam penyampaian pesan keagamaan daring.

Dimensi kedua adalah Dimensi Sosiologis yang menganalisis dampak polarisasi keagamaan digital terhadap kohesi sosial dan ketahanan komunitas. Dimensi ini mengkaji bagaimana polarisasi digital memengaruhi hubungan antar kelompok keagamaan, membentuk stereotip, dan melemahkan modal sosial (social capital). Rosyid, Amalia, dan Sa'adah (2025) menemukan bahwa mahasiswa sebagai kelompok demografis yang paling aktif di media sosial menjadi korban utama polarisasi keagamaan digital yang mempengaruhi sikap moderasi mereka. Nurlatifah dan Prihantoro (2026) mengembangkan konsep fikih moderasi dalam ruang publik digital yang menghubungkan norma keagamaan dengan etika media sosial. Indikator dimensi sosiologis mencakup tingkat kohesi sosial antar

kelompok keagamaan, frekuensi interaksi lintas pemahaman di ruang digital, dan keberadaan mekanisme resolusi konflik berbasis moderasi di platform digital.

Dimensi ketiga adalah Dimensi Digital yang mengkaji mekanisme algoritmik dan infrastruktur teknologi yang memengaruhi polarisasi keagamaan. Dimensi ini menganalisis bagaimana algoritma rekomendasi, fitur engagement, dan desain platform media sosial berkontribusi terhadap pembentukan enklave digital dan echo chamber keagamaan. Lim (2017) menunjukkan bahwa algoritma yang mengutamakan konten provokatif dan emosional secara sistematis menguntungkan narasi ekstrem dibandingkan narasi moderat. Campbell (2013) menekankan perlunya memahami bagaimana affordansi teknologi membentuk praktik keagamaan digital. Indikator dimensi digital meliputi tingkat literasi digital keagamaan komunitas, keterpaparan terhadap konten lintas perspektif, dan ketersediaan mekanisme filter dan moderasi konten keagamaan di platform.

Dimensi keempat adalah Dimensi Institusional yang mengevaluasi respons dan kapasitas lembaga keagamaan dalam menghadapi polarisasi digital. Dimensi ini mengkaji bagaimana organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lembaga dakwah lainnya beradaptasi dengan tantangan dakwah digital dan mempertahankan peran moderasi mereka. Kurniawan dan Suparto (2025) menganalisis strategi Al-Jam'iyatul Washliyah dalam menguatkan wawasan kebangsaan di era disrupsi, menemukan bahwa lembaga keagamaan tradisional perlu mengembangkan kapasitas digital untuk mempertahankan relevansinya. Faisal dan Syaifuddin (2025) menunjukkan transformasi dakwah Muhammadiyah di era digital dan penguatan moderasi beragama di Bima sebagai contoh adaptasi institusional. Indikator dimensi institusional mencakup ketersediaan kebijakan dakwah digital, kapasitas sumber daya manusia digital, dan efektivitas mekanisme kontrol kualitas konten keagamaan institusional.

Dimensi kelima adalah Dimensi Kultural yang mengeksplorasi negosiasi antara nilai-nilai lokal, tradisi Nusantara, dan pengaruh transnasional dalam konteks polarisasi keagamaan digital. Dimensi ini mengkaji bagaimana budaya lokal dan kearifan Nusantara dapat menjadi sumber ketahanan terhadap polarisasi yang dipicu oleh narasi transnasional. Yusuf dan Musyafa (2026) menganalisis kontestasi ideologi Islam di ruang digital yang menunjukkan tekanan signifikan dari narasi puritan transnasional terhadap tradisi Islam moderat Nusantara. Effendi, Lukman, dan Rustandi (2022) menekankan pentingnya dakwah digital berbasis moderasi beragama yang mengakar pada budaya lokal. Indikator dimensi kultural meliputi keberadaan konten dakwah berbasis kearifan lokal, tingkat resistensi terhadap narasi puritan transnasional, dan integrasi nilai-nilai kebhinekaan dalam wacana keagamaan digital.

**Tabel 1. Framework Multidimensi Moderasi Beragama sebagai Strategi Ketahanan Sosial**

Dimensi	Fokus Analisis	Indikator Utama	Sumber Teoretis
Teologis	Fondasi normatif moderasi beragama digital	1. Kelengkapan basis wasathiyah dalam konten	Sabila et al. (2025); Fahmi (2026); Effendi et al. (2022)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keseimbangan perspektif keagamaan</li> <li>3. Komitmen anti-kekerasan digital</li> </ol>	
Sosiologis	Dampak polarisasi terhadap kohesi sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kohesi antar kelompok</li> <li>2. Frekuensi interaksi lintas pemahaman</li> <li>3. Mekanisme resolusi konflik digital</li> </ol>	Rosyid et al. (2025); Nurlatifah & Prihantoro (2026); Couldry (2012)
Digital	Mekanisme algoritmik dan infrastruktur teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Literasi digital keagamaan</li> <li>2. Keterpaparan konten lintas perspektif</li> <li>3. Mekanisme moderasi konten platform</li> </ol>	Lim (2017); Campbell (2013); Campbell & Evolvi (2020)
Institusional	Respons dan kapasitas lembaga keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dakwah digital</li> <li>2. Kapasitas SDM digital</li> <li>3. Kontrol kualitas konten institusional</li> </ol>	Kurniawan & Suparto (2025); Faisal & Syaifuddin (2025); Barton & Fealy (2010)
Kultural	Negosiasi lokal-global dan kearifan Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konten dakwah berbasis kearifan lokal</li> <li>2. Resistensi narasi puritan transnasional</li> <li>3. Integrasi nilai kebhinekaan</li> </ol>	Yusuf & Musyafa (2026); Effendi et al. (2022); Bauman (2017)

Framework multidimensi ini memberikan kerangka komprehensif untuk menganalisis moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial di era digital. Keunggulan framework ini terletak pada kemampuannya menghubungkan level analisis mikro (individu dan konten), meso (institusi dan komunitas), dan makro (budaya dan sistem sosial) dalam satu kesatuan analitis yang koheren. Interaksi antar dimensi juga penting diperhatikan: dimensi teologis menyediakan basis normatif, dimensi sosiologis mengidentifikasi dampak, dimensi digital menjelaskan mekanisme, dimensi institusional mengevaluasi respons, dan dimensi kultural memberikan konteks lokal yang spesifik.

### ***Model Transformasi Ketahanan Sosial Keagamaan Berfase Empat***

Berdasarkan sintesis literatur dan analisis tematik, penelitian ini mengembangkan model transformasi ketahanan sosial keagamaan berfase empat yang menggambarkan tahapan dari kondisi polarisasi menuju kondisi moderasi berkelanjutan di ruang digital. Model ini mengadaptasi kerangka resiliensi dari teori ketahanan sosial dan menerapkannya secara spesifik pada konteks polarisasi keagamaan pasca digitalisasi dakwah. Setiap fase memiliki karakteristik, strategi, dan indikator keberhasilan yang berbeda, namun saling terkait dalam sebuah proses transformasi yang iteratif dan non-linear.

Fase pertama adalah Identifikasi yang berfokus pada pemetaan dan diagnosis polarisasi keagamaan digital. Pada fase ini, yang merupakan fase fondasional, aktor keagamaan dan pemangku kepentingan mengidentifikasi pola-pola polarisasi, enklave digital, dan mekanisme algoritmik yang mendorong segregasi keagamaan. Shodiqin, Khosim, dan Iryana (2025) menunjukkan bahwa proses identifikasi memerlukan pemahaman tentang dinamika kesalehan digital dan negosiasi otoritas Islam di media sosial. Prayitno (2025) menegaskan pentingnya identifikasi bentuk-bentuk deotorisasi hadis di internet sebagai bagian dari diagnosis polarisasi. Aktivitas utama pada fase ini meliputi pemetaan ekosistem dakwah digital, identifikasi aktor dan narasi polarisasi, dan pengukuran tingkat polarisasi menggunakan indikator framework multidimensi yang telah dikembangkan.

Fase kedua adalah Mitigasi yang berfokus pada pengendalian dan pengurangan dampak polarisasi keagamaan digital. Pada fase ini, strategi intervensi diimplementasikan untuk mengurangi efek negatif polarisasi dan mencegah eskalasi konflik keagamaan di ruang digital. Kurniawan dan Suparto (2025) menunjukkan bahwa strategi moderasi dan kebangsaan yang diterapkan oleh organisasi keagamaan dapat menjadi model mitigasi yang efektif. Nurlatifah dan Prihantoro (2026) mengembangkan fikih moderasi dalam ruang publik digital sebagai instrumen normatif untuk mitigasi polarisasi. Aktivitas utama pada fase mitigasi meliputi penguatan literasi digital keagamaan, pengembangan konten moderasi yang menarik, dan pembangunan jaringan dai moderat di ruang digital. Strategi mitigasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan pencegahan ujaran kebencian keagamaan.

Fase ketiga adalah Resiliensi yang berfokus pada pembangunan kapasitas ketahanan komunitas keagamaan terhadap polarisasi digital. Pada fase ini, komunitas keagamaan tidak hanya berhasil mengendalikan polarisasi tetapi juga membangun kekebalan terhadap tekanan polarisasi di masa depan. Faisal dan Syaifuddin (2025) menunjukkan bagaimana transformasi dakwah Muhammadiyah di era digital tidak hanya mengatasi polarisasi tetapi juga membangun ketahanan komunitas melalui penguatan moderasi beragama. Fahmi (2026) mengidentifikasi implementasi empat pilar etika Aswaja sebagai mekanisme resiliensi digital. Aktivitas utama pada fase resiliensi mencakup institusionalisasi moderasi beragama digital dalam kurikulum pendidikan, pembentukan komunitas digital moderat yang aktif, dan pengembangan sistem peringatan dini (early warning) terhadap narasi polarisasi.

Fase keempat adalah Transformasi yang berfokus pada penciptaan ekosistem digital keagamaan yang inklusif, moderat, dan berkelanjutan. Pada fase ini, moderasi beragama bukan lagi menjadi respons terhadap polarisasi melainkan telah menjadi karakteristik inheren dari ekosistem dakwah digital. Ulya, Al-Karim, dan Kurniawan (2025) mengidentifikasi strategi komunikasi Islam moderat di era post-truth yang menggambarkan transformasi dari pendekatan reaktif ke proaktif. Sabila, Ridwan, dan Aryansyah (2025) menunjukkan model dakwah moderasi ulama Nusantara yang mengintegrasikan tradisi dan ketahanan sebagai visi transformasi. Aktivitas utama pada fase transformasi meliputi reformulasi arsitektur algoritma platform untuk mendukung moderasi, pembangunan infrastruktur dakwah digital berbasis inklusivitas, dan penciptaan ekosistem di mana konten moderat secara algoritmik lebih terjangkau dibandingkan konten ekstrem.

**Tabel 2. Model Transformasi Ketahanan Sosial Keagamaan Berfase Empat**

Fase	Karakteristik	Strategi Utama	Indikator Keberhasilan
Identifikasi	Pemetaan dan diagnosis polarisasi keagamaan digital; kesadaran akan keberadaan enklave dan echo chamber	1. Pemetaan ekosistem dakwah digital 2. Identifikasi aktor dan narasi polarisasi 3. Pengukuran tingkat polarisasi	1. Tersedianya peta polarisasi digital 2. Teridentifikasinya aktor kunci 3. Terukurnya tingkat polarisasi per dimensi
Mitigasi	Pengendalian dan pengurangan dampak polarisasi; intervensi strategis untuk mencegah eskalasi	1. Penguatan literasi digital keagamaan 2. Pengembangan konten moderasi 3. Pembangunan jaringan dai moderat	1. Meningkatnya literasi digital keagamaan 2. Bertambahnya konten moderasi 3. Terbentuknya jaringan dai moderat
Resiliensi	Pembangunan kapasitas ketahanan komunitas; institusionalisasi moderasi dalam sistem digital	1. Institutionalisi moderasi dalam kurikulum 2. Pembentukan komunitas digital moderat 3. Sistem peringatan dini polarisasi	1. Tersetornya moderasi dalam kelembagaan 2. Aktifnya komunitas moderat 3. Berfungsinya sistem peringatan dini
Transformasi	Penciptaan ekosistem digital inklusif;	1. Reformulasi arsitektur algoritma	1. Algoritma mendukung konten moderat 2. Infrastruktur inklusif

	moderasi menjadi karakter inheren ekosistem dakwah	2. Infrastruktur dakwah inklusif 3. Ekosistem konten moderat dominan	tersedia 3. Konten moderat lebih terjangkau
--	--	---	--

Model transformasi berfase empat ini bersifat iteratif, artinya pergeseran dari satu fase ke fase berikutnya tidak bersifat linear dan satu arah. Komunitas keagamaan dapat mengalami kemunduran (regresi) dari fase yang lebih tinggi ke fase yang lebih rendah ketika menghadapi tekanan polarisasi baru atau perubahan dalam lanskap digital. Selain itu, dimungkinkan pula kondisi di mana komponen berbeda dari satu komunitas berada pada fase yang berbeda secara simultan, misalnya dimensi institusional sudah mencapai fase resiliensi sementara dimensi digital masih pada fase mitigasi. Fleksibilitas model ini memungkinkan aplikasinya pada konteks yang beragam dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing komunitas keagamaan dan ekosistem digital lokal.

Penting untuk dicatat bahwa kecepatan transisi antar fase sangat dipengaruhi oleh faktor kontekstual yang meliputi tingkat literasi digital komunitas, dukungan kebijakan pemerintah, komitmen kepemimpinan lembaga keagamaan, dan karakteristik ekosistem media sosial yang dominan di suatu wilayah. Komunitas yang memiliki tradisi dialog antar-pemahaman yang kuat dan kepemimpinan yang visioner cenderung bergerak lebih cepat melalui fase-fase transformasi. Sebaliknya, komunitas yang terfragmentasi secara internal dan kekurangan kapasitas digital mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk bertransisi dari fase identifikasi ke fase mitigasi. Oleh karena itu, intervensi di setiap fase harus dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor pemercepat (accelerators) dan penghambat (barriers) yang spesifik bagi setiap konteks, sehingga strategi ketahanan sosial dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

### Studi Kasus Lembaga Keagamaan di Indonesia

Untuk menguji penerapan framework multidimensi dan model transformasi berfase, penelitian ini menganalisis tiga lembaga keagamaan di Indonesia yang memiliki karakteristik dan respons berbeda terhadap polarisasi keagamaan digital. Pemilihan kasus didasarkan pada variasi dalam tradisi keagamaan, kapasitas digital, dan strategi moderasi yang diterapkan. Analisis komparatif terhadap ketiga kasus ini memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana konteks institusional dan kultural memengaruhi efektivitas moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial di era digital.

Kasus pertama adalah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki tradisi Islam moderat berbasis tradisi Aswaja dan kearifan lokal. NU telah mengembangkan berbagai inisiatif dakwah digital, termasuk platform daring dan konten media sosial yang menekankan moderasi beragama. Barton dan Fealy (2010) menunjukkan bahwa

tradisi fikih NU yang mengakomodasi lokalitas memberikan basis yang kuat untuk moderasi beragama. Dalam konteks digital, NU menghadapi tantangan dari narasi puritan transnasional yang mempertanyakan legitimasi praktik keagamaan tradisional. Sabila, Ridwan, dan Aryansyah (2025) mengidentifikasi bahwa model dakwah moderasi ulama Nusantara yang dipraktikkan oleh NU dapat menjadi sumber ketahanan terhadap polarisasi digital. Secara institusional, NU telah mencapai fase resiliensi dengan mengintegrasikan moderasi beragama dalam kurikulum pesantren dan program dakwah digitalnya, meskipun dimensi digitalnya masih pada fase mitigasi karena keterbatasan jangkauan konten moderat NU dibandingkan konten viral yang provokatif.

Kasus kedua adalah Muhammadiyah yang memiliki tradisi pembaruan Islam dan telah menunjukkan adaptasi signifikan terhadap tantangan digitalisasi dakwah. Faisal dan Syaifuddin (2025) menganalisis transformasi dakwah Muhammadiyah di era digital di Bima, menemukan bahwa organisasi ini telah mengembangkan strategi dakwah digital yang lebih terstruktur dan berbasis data. Muhammadiyah menghadapi tantangan unik dalam bentuk ketegangan antara semangat pemurnian dan komitmen moderasi, yang di ruang digital sering kali menghasilkan narasi ambivalen. Kholisari (2025) mengidentifikasi bahwa kontestasi otoritas keagamaan di ruang digital mempengaruhi kemampuan Muhammadiyah untuk mempertahankan garis moderasi di tengah tekanan dari kelompok yang lebih konservatif di dalam maupun di luar organisasi. Secara keseluruhan, Muhammadiyah berada pada transisi antara fase mitigasi dan resiliensi, dengan kemajuan signifikan dalam pengembangan konten digital namun masih perlu memperkuat institusionalisasi moderasi dalam arsitektur digitalnya.

Kasus ketiga adalah Al-Jam'iyatul Washliyah (Al-Washliyah) sebagai organisasi keagamaan yang memiliki akar kuat dalam tradisi Islam moderat Sumatera Utara. Kurniawan dan Suparto (2025) menganalisis strategi Al-Washliyah dalam menguatkan wawasan kebangsaan di era disrupsi, menemukan bahwa organisasi ini mengembangkan pendekatan dakwah moderasi yang mengintegrasikan nilai keagamaan dengan semangat kebangsaan. Al-Washliyah menghadapi tantangan kapasitas digital yang lebih besar dibandingkan NU dan Muhammadiyah, dengan keterbatasan dalam pengembangan konten digital dan jangkauan platform. Namun, basis kultural yang kuat dalam tradisi Melayu yang inklusif memberikan fondasi yang kokoh untuk moderasi beragama. Secara transformasi, Al-Washliyah masih berada pada fase identifikasi-ke-mitigasi, dengan upaya yang sedang berjalan untuk membangun kapasitas digital dan mengembangkan strategi dakwah digital berbasis moderasi yang sesuai dengan konteks kulturalnya.

**Tabel 3. Analisis Komparatif Studi Kasus  
Lembaga Keagamaan di Indonesia**

Aspek	Nahdlatul Ulama	Muhammadiyah	Al-Washliyah
Tradisi Keagamaan	Islam tradisional berbasis Aswaja	Islam pembaruan berbasis tajdid dan	Islam moderat berbasis tradisi

	dan fikih lokal; mengkomodasi tradisi dan budaya Nusantara	ijtihad; menekankan pemurnian sekaligus kemoderatan	Melayu; mengintegrasikan keagamaan dan kebangsaan
Kapasitas Digital	Sedang-Tinggi; memiliki platform digital dan jaringan media sosial luas; konten beragam	Sedang-Tinggi; strategi digital terstruktur; konten berbasis data dan analitik	Rendah-Sedang; keterbatasan infrastruktur digital; konten masih terbatas
Fase Transformasi	Resiliensi (institusional); Mitigasi (digital)	Mitigasi-Resiliensi (transisi)	Identifikasi-Mitigasi (awal)
Tantangan Utama	1. Narasi puritan transnasional 2. Keterbatasan jangkauan konten moderat 3. Fragmentasi internal	1. Ketegangan pemurnian-moderasi 2. Kontestasi otoritas internal 3. Ambivalensi narasi digital	1. Keterbatasan kapasitas digital 2. Minimnya konten digital moderat 3. Ketergantungan pada tokoh sentral
Strategi Moderasi	1. Fikih moderat berbasis lokalitas 2. Pesantren digital 3. Jaringan dai moderat	1. Dakwah digital berbasis data 2. Konten edukatif terstruktur 3. Branding moderasi institusional	1. Dakwah kebangsaan 2. Penguatan tradisi Melayu 3. Kolaborasi antar lembaga
Keunggulan Komparatif	Basis tradisi kuat dan jaringan luas	Kapabilitas digital dan analitik	Integrasi keagamaan-kebangsaan otentik

Analisis komparatif menunjukkan bahwa efektivitas moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial sangat bergantung pada interaksi antara tradisi keagamaan, kapasitas digital, dan konteks kultural. NU memiliki keunggulan dalam basis tradisi dan jaringan, namun masih perlu meningkatkan jangkauan konten moderatnya di ruang digital. Muhammadiyah menunjukkan kemampuan adaptasi digital yang lebih terstruktur, namun menghadapi tantangan internal dalam menjaga konsistensi narasi moderasi. Al-Washliyah memiliki fondasi kultural yang kuat namun terbatas dalam kapasitas digital. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa tidak ada model tunggal yang dapat diterapkan secara universal; strategi moderasi harus disesuaikan dengan konteks spesifik masing-masing lembaga keagamaan.

Sebuah temuan menarik dari analisis komparatif ini adalah bahwa kapasitas digital yang tinggi tidak secara otomatis menjamin efektivitas moderasi beragama. Muhammadiyah yang memiliki kapasitas digital terstruktur masih menghadapi tantangan internal dalam menjaga konsistensi narasi moderasi,

sementara Al-Washliyah dengan kapasitas digital yang lebih terbatas justru memiliki fondasi kultural yang memberikan ketahanan alami terhadap narasi polarisasi transnasional. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi dalam infrastruktur digital semata tidak cukup; diperlukan penguatan simultan pada dimensi teologis dan kultural sebagai fondasi yang memberikan makna dan arah bagi pemanfaatan teknologi digital dalam konteks moderasi beragama. Kolaborasi antar lembaga keagamaan dalam berbagi sumber daya digital dan praktik terbaik moderasi juga menjadi kunci untuk mempercepat transformasi ketahanan sosial keagamaan di tingkat nasional.

### **Analisis Kritis: Tantangan dan Risiko Integrasi**

Meskipun framework multidimensi dan model transformasi yang dikembangkan menawarkan kerangka yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi polarisasi keagamaan digital, terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang perlu dikritisi secara mendalam. Analisis kritis ini penting untuk menghindari pandangan yang terlalu optimistis tentang potensi moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial dan untuk mengidentifikasi batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.

Risiko pertama adalah ko-optasi moderasi beragama oleh kepentingan politik. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama telah menjadi agenda kebijakan publik yang tidak lepas dari kontestasi politik. Bauman (2017) mengingatkan bahwa dalam liquid modernity, konsep-konsep normatif seperti moderasi dapat dikosongkan dari substansinya dan dijadikan instrumen kekuasaan. Ketika moderasi beragama diinstrumentalisasi untuk tujuan politik yang sempit, ia kehilangan legitimasi di mata komunitas keagamaan dan justru dapat memperburuk polarisasi. Rachman dan Saumantri (2025) menunjukkan bahwa transformasi otoritas keagamaan di era digital semakin memperumit masalah ini, karena aktor politik dapat memanfaatkan fragmentasi otoritas untuk kepentingan elektoral dengan menyebarkan narasi yang mengatasnamakan moderasi tetapi sebenarnya bersifat eksklusif dan divisif.

Risiko kedua adalah determinisme teknologis yang mengabaikan agensi komunitas keagamaan. Dalam upaya mengatasi polarisasi digital, terdapat kecenderungan untuk menyalahkan algoritma dan platform media sosial secara eksklusif, tanpa mempertimbangkan peran aktif komunitas keagamaan dalam memproduksi dan mengonsumsi konten polarisasi. Castells (2010) menekankan bahwa meskipun jaringan digital mengubah struktur kekuasaan, agensi manusia tetap memainkan peran sentral. Couldry (2012) mengargumenkan bahwa praktik mediasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi tetapi juga oleh konfigurasi sosial, ekonomi, dan politik di mana teknologi itu dioperasikan. Risiko determinisme teknologis ini dapat menghasilkan solusi yang terlalu berfokus pada regulasi platform tanpa menyentuh akar masalah polarisasi yang berada pada level epistemologis dan teologis.

Risiko ketiga adalah supremasi model moderasi yang mengabaikan keragaman internal Islam Indonesia. Konsep moderasi beragama yang

didefinisikan secara tunggal dan normatif berpotensi marginalisasi ekspresi keberagaman yang berbeda namun tetap berada dalam koridor kesopanan dan toleransi. Ningrum (2025) mengingatkan bahwa teologi inklusif dalam konteks digital memerlukan pengakuan terhadap keragaman yang melampaui kategori biner moderat-ekstrem. Yusuf dan Musyafa (2026) menunjukkan bahwa kontestasi ideologi Islam di ruang digital tidak dapat direduksi menjadi pertentangan sederhana antara moderasi dan ekstremisme, melainkan melibatkan spektrum posisi keagamaan yang kompleks dan berubah-ubah. Risiko ini menuntut pendekatan yang lebih nuansa dan kontekstual dalam mendefinisikan dan mengukur moderasi beragama, yang mengakui keragaman internal tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip dasar toleransi dan anti-kekerasan.

Risiko keempat adalah kesenjangan digital (*digital divide*) yang memperburuk ketimpangan dalam akses terhadap konten moderasi. Upaya penguatan moderasi beragama digital cenderung menguntungkan kelompok yang sudah memiliki akses dan literasi digital yang baik, sementara kelompok yang kurang terlayani justru semakin rentan terhadap konten polarisasi. Campbell dan Evolvi (2020) menekankan bahwa riset tentang agama digital perlu mempertimbangkan kesenjangan akses dan literasi yang mempengaruhi cara berbeda di mana komunitas berinteraksi dengan teknologi digital. Dalam konteks Indonesia, kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan, antara generasi muda dan tua, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda menciptakan lanskap yang tidak merata di mana konten moderasi mungkin tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkannya.

**Tabel 4. Risiko Kritis dan Strategi Mitigasi**

Risiko	Deskripsi	Dampak	Strategi Mitigasi
Ko-optasi Politik	Moderasi beragama diinstrumentalisasi untuk kepentingan politik sempit; kehilangan substansi normatif	Hilangnya legitimasi moderasi; meningkatnya sinisme komunitas keagamaan terhadap agenda moderasi	1. Independensi lembaga moderasi 2. Transparansi pendanaan 3. Partisipasi multistakeholder
Determinisme Teknologis	Menyalahkan algoritma secara eksklusif tanpa mempertimbangkan agensi komunitas dan faktor sosial	Solusi parsial yang tidak menyentuh akar masalah; ketergantungan pada regulasi platform	1. Pendekatan sosio-teknologis 2. Penguatan agensi komunitas 3. Kritik terhadap narasi teknosolutionis
Supremasi Model Tunggal	Definisi tunggal moderasi yang mengabaikan keragaman internal Islam Indonesia	Marginalisasi ekspresi keberagaman yang berbeda; reduksi kompleksitas ke kategori biner	1. Pendekatan multivokal 2. Pengakuan keragaman internal 3. Definisi kontekstual moderasi

Kesenjangan Digital	Ketimpangan akses dan literasi digital yang membuat konten moderasi tidak menjangkau kelompok rentan	Kelompok rentan semakin terpapar konten polarisasi; peningkatan fragmentasi digital	1. Inklusivitas akses digital 2. Program literasi multi-level 3. Konten adaptif untuk berbagai segmen
---------------------	--	---	---

Analisis kritis ini menegaskan bahwa moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial tidak dapat diterapkan secara mekanistik dan universal. Diperlukan pendekatan yang reflektif, kontekstual, dan sensitif terhadap dinamika kekuasaan yang melingkupi diskursus moderasi beragama di era digital. Keempat risiko yang diidentifikasi saling berkaitan dan memerlukan strategi mitigasi yang terintegrasi. Ko-optasi politik misalnya, dapat diperburuk oleh kesenjangan digital yang membuat kelompok rentan lebih mudah dimanipulasi oleh narasi yang mengatasnamakan moderasi tetapi sebenarnya bersifat eksklusif. Determinisme teknologis dapat memperkuat supremasi model tunggal jika solusi hanya difokuskan pada perubahan algoritma tanpa mempertimbangkan keragaman konteks sosial. Oleh karena itu, implementasi framework multidimensi dan model transformasi harus dilakukan secara reflektif dan adaptif, dengan kesadaran terus-menerus terhadap risiko-risiko yang menyertainya.

## SIMPULAN

Penelitian ini telah mengembangkan kerangka analisis komprehensif untuk memahami peran moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial dalam menghadapi polarisasi keagamaan pasca digitalisasi dakwah. Framework multidimensi yang mencakup dimensi teologis, sosiologis, digital, institusional, dan kultural memberikan lensa analitis yang mampu mengakomodasi kompleksitas fenomena polarisasi keagamaan digital secara holistik. Model transformasi berfase empat yang terdiri dari identifikasi, mitigasi, resiliensi, dan transformasi menyediakan peta jalan yang fleksibel dan iteratif bagi komunitas keagamaan dalam membangun ketahanan sosial di era digital. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi keagamaan digital bukan semata masalah teknologis yang dapat diatasi melalui regulasi platform atau rekayasa algoritma, melainkan fenomena sosio-teologis yang memerlukan pendekatan multidimensi. Algoritma media sosial memang berperan dalam menciptakan enklave digital dan memperkuat echo chamber, namun agensi komunitas keagamaan, tradisi teologis, dan konteks kultural turut menentukan sejauh mana polarisasi berdampak pada ketahanan sosial. Studi kasus terhadap Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Washliyah mengkonfirmasi bahwa efektivitas moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial sangat bergantung pada interaksi dinamis antara tradisi keagamaan, kapasitas digital, dan konteks kultural yang spesifik. Analisis kritis mengungkap empat risiko utama yang mengancam efektivitas moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial: ko-optasi politik, determinisme teknologis, supremasi model tunggal, dan kesenjangan digital.

Keempat risiko ini saling berkaitan dan memerlukan strategi mitigasi yang terintegrasi dan reflektif. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya penguatan moderasi beragama digital harus dilakukan secara kontekstual, inklusif, dan kritis terhadap dinamika kekuasaan yang melingkupinya, dengan tetap menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar toleransi, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai fondasi ketahanan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk penguatan moderasi beragama sebagai strategi ketahanan sosial di era digital. Pertama, penguatan literasi digital keagamaan perlu menjadi prioritas nasional yang melampaui sekadar keterampilan teknis menggunakan platform digital, melainkan mencakup kemampuan kritis untuk mengevaluasi konten keagamaan, mengidentifikasi narasi polarisasi, dan memahami mekanisme algoritmik yang memengaruhi konsumsi informasi keagamaan. Program literasi ini harus dirancang secara multi-level, mulai dari level individu hingga institusional, dengan mempertimbangkan keragaman konteks sosial-budaya dan tingkat akses digital yang berbeda di setiap komunitas. Kedua, reformulasi otoritas dakwah berbasis kompetensi perlu dilakukan untuk menghadapi fragmentasi otoritas di ruang digital. Sertifikasi dan akreditasi dai digital yang mencakup kompetensi keilmuan keislaman, literasi digital, dan pemahaman moderasi beragama dapat menjadi mekanisme untuk memulihkan kualitas wacana keagamaan digital. Lembaga keagamaan harus mengembangkan program pelatihan dai digital yang terstruktur dan berbasis standar kompetensi yang jelas, dengan memanfaatkan tradisi keilmuan yang mapan sebagai fondasi otoritas yang sah di ruang digital. Ketiga, pembangunan ekosistem digital inklusif memerlukan kolaborasi antara lembaga keagamaan, platform teknologi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Dialog antar pemangku kepentingan perlu diintensifkan untuk merancang mekanisme moderasi konten yang menghormati kebebasan berpendapat sekaligus mencegah penyebaran ujaran kebencian keagamaan. Arsitektur algoritma yang mendukung diversitas perspektif dan mengurangi pembentukan echo chamber harus menjadi bagian dari desain platform yang bertanggung jawab. Keempat, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengembangkan instrumen pengukuran moderasi beragama digital yang tervalidasi, melakukan studi longitudinal tentang dinamika polarisasi, serta mengeksplorasi peran kecerdasan buatan dalam mengidentifikasi dan mengurangi konten polarisasi keagamaan di ruang digital.

## DAFTAR RUJUKAN

- Barton, G., & Fealy, G. (2010). *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*. Monash University Press.
- Bauman, Z. (2017). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- Campbell, H. A. (2013). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. Routledge.

- Campbell, H. A., & Evolvi, G. (2020). Contextualizing Current Digital Religion Research on Emerging Technologies. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(1), 5-17. <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Couldry, N. (2012). *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*. Polity Press.
- Effendi, D. I., Lukman, D., & Rustandi, R. (2022). *Dakwah Digital Berbasis Moderasi Beragama*. Yayasan Lidzikri.
- Fahmi, F. (2026). Indonesia's Digital Resilience through the Implementation of the Four Pillars of Aswaja Ethics for Cyber Harmony. *Smart: Journal of Islamic Religion and Sharia Studies*. <http://ejournal.smartpedia.co.id/index.php/SSharia/article/view/17>
- Faisal, F., & Syaifuddin, S. (2025). Transformasi Dakwah Muhammadiyah di Era Digital dan Penguatan Moderasi Beragama di Bima. *Raudhah Journal*. <https://ejournal.iainurru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/1092>
- Kholisari, D. F. (2025). Dakwah Stylish di Era Digital dan Kontestasi Otoritas Keagamaan: Studi Kasus Hanan Attaki dan Ustadz Selebritas Indonesia. *El-Hikmah Journal*. <https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/477>
- Kurniawan, R., & Suparto, S. (2025). Dakwah Moderasi dan Kebangsaan: Strategi Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di Era Disrupsi. *Ad-Da'wah*. <http://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/154>
- Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Ningrum, K. S. (2025). Tantangan Dakwah Digital dalam Sikap Beragama Teologi Inklusif: Pandangan Komunitas Muslim Moderat Indonesia di Media Sosial. *JUTEQ: Jurnal Teologi dan Tafsir*. <http://languar.net/index.php/JUTEQ/article/view/249>
- Nisa, E. F. (2018). Creative and Lucrative Da'wa: The Visual Culture of Instagram amongst Female Muslim Youth in Indonesia. *Asiascape: Digital Asia*, 5(1-2), 68-99. <https://doi.org/10.1163/22142312-12340085>
- Nurlatifah, S., & Prihantoro, W. K. (2026). Fikih Moderasi dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial dan Dakwah Virtual. *Journal of Islamic Ethics and Education*. <http://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JIEE/article/view/239>
- Prayitno, D. (2025). Bentuk-Bentuk Deotorisasi Hadis di Internet: Analisis Kontemporer terhadap Distorsi Otoritas Keilmuan dalam Ruang Digital. *Al-Furqan Journal*. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2158>
- Rachman, A., & Saumantri, T. (2025). Transformation of Religious Authority in the Digital Era: A Post-Normal Times Analysis by Ziauddin Sardar on the Phenomenon of Social Media Da'wah. *Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/25644>
-

- Rosyid, M. H. A., Amalia, D., & Sa'adah, D. A. (2025). Moderasi Beragama di Era Digital: Tantangan Dakwah di Tengah Polarisasi Media Sosial pada Mahasiswa. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*.
- Sabila, N. A., Ridwan, A. A., & Aryansyah, D. (2025). Bayang-Bayang Kolonial dan Digital: Model Dakwah Moderasi Ulama Nusantara, Tradisi, dan Ketahanan. *Advances in Education Journal*. <https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/455>
- Shodiqin, A., Khosim, A., & Iryana, W. (2025). Kesalehan Digital dan Moderasi Keagamaan: Negosiasi Otoritas Islam di Era Media Sosial. *Journal of Society and Development*. <http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/344>
- Slama, M. (2018). Practising Islam through Social Media in Indonesia and the Malay World, 46(134), 1-4. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416798>
- Ulfa, M. (2024). Transformasi Komunikasi Dakwah dan Pengaruhnya terhadap Praktik Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia. *Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*. <https://ojs.nupalengaan.or.id/NAHNU/article/view/58>
- Ulya, K. L. H., Al-Karim, M. F. A., & Kurniawan, B. (2025). Dakwah Digital Multimazhab: Analisis Strategi Komunikasi Islam Moderat di Era Post-Truth. *Menulis: Jurnal Komunikasi Islam*. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/410>
- Yusuf, A. F., & Musyafa, N. (2026). *Kontestasi Ideologi Islam di Ruang Digital*. Deepublish.